

EVALUASI ANGGARAN PROGRAM EKOWISATA  
DI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

DESTY SUNJA PURNAMA



BBTNGGP

P1  
0964

DEPATEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA  
FAKULTAS KEHUTANAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2019

**EVALUASI ANGGARAN PROGRAM EKOWISATA  
DI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

**DESTY SUNJA PURNAMA**



**DEPATEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA  
FAKULTAS KEHUTANAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2019**

## **PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA\***

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Evaluasi Anggaran Program Ekowisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2019

*Desty Sunja Purnama*  
NIM E34150027

## **ABSTRAK**

DESTY SUNJA PURNAMA. Evaluasi Anggaran Program Ekowisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dibimbing oleh TUTUT SUNARMINTO dan HARNIOS ARIEF.

Salah satu cara untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja organisasi atau lembaga, termasuk dalam hal ini Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) sebagai suatu kawasan konservasi yaitu melalui kinerja anggaran. Anggaran TNGGP pada tahun 2018 bersumber dari APBN yaitu Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN merupakan anggaran pembangunan sarana prasana ekowisata yang membutuhkan kerjasama dari pihak luar sebagai mitra dalam pengelolaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi perbedaan antara perencanaan dan penggunaan anggaran, mengukur tingkat kesesuaian sistem anggaran dan menilai upaya evaluasi harmonisasi anggaran ekowisata di TNGGP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi lapang non partisipasi, studi literatur dan menggunakan analisis isi dan deskriptif. Evaluasi perbedaan perencanaan dan penggunaan dilihat dari mekanisme pengajuan anggaran berawal dari perencanaan rancangan program kegiatan yang berada di RPJP kemudian disusun rancangan anggaran yang akan diimplementasikan melalui RKT. Penggunaan anggaran ekowisata meliputi anggaran perencanaan, anggaran pengembangan sumberdaya manusia, anggaran promosi, anggaran pembangunan sarana prasarana, dan anggaran pemeliharaan ekowisata. Tingkat kepuasan pengelola TNGGP terhadap pengelolaan ekowisata yang dilakukan adalah agak baik. Tingkat kepuasan pengelola TNGGP dan mitra cukup memuaskan karena hasil dari kerjasama dalam pengelolaan ekowisata dapat memberikan benefit dari kedua belah pihak. Upaya evaluasi harmonisasi anggaran berhasil dengan melakukan pemilihan program kegiatan prioritas dari dokumen RPJP menjadi RKT dan melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam melakukan pengelolaan ekowisata.

Kata kunci: Anggaran, ekowisata, evaluasi, Taman Nasional Gunung Gede (TNGGP)

## **ABSTRACT**

*DESTY SUNJA PURNAMA. Budget Evaluation of the Ecotourism Program in Mount Gede Pangrango National Park. Supervised by TUTUT SUNARMINTO and HARNIOS ARIEF.*

*One way to assess the level of success of an organization or institution's performance, including in this case the Gunung Gede Pangrango National Park (TNGGP) as a conservation area is through budget performance. TNGGP's budget in 2018 is sourced from the state budget, namely Pure Rupiah (RM), Non-Tax State Revenue (PNBP) and State Sharia Securities (SBSN). SBSN is a budget for the development of ecotourism facilities that require cooperation from outside*

*parties as partners in its management. The purpose of this study is to evaluate the differences between planning and use of the budget, measure the suitability of the budget system and assess the effort to evaluate the harmonization of the ecotourism budget in TNGGP. The method used in this research is interview, non-participatory field observation, literature study and using content and descriptive analysis. Evaluation of differences in planning and use can be seen from the budget submission mechanism starting from the planning of program activity plans that are in the RPJP then the draft budget will be prepared which will be implemented through the RKT. The use of ecotourism budgets includes planning budgets, human resource development budgets, promotion budgets, infrastructure development budgets, and ecotourism maintenance budgets. The level of satisfaction of the management of TNGGP towards the management of ecotourism is quite good. The level of satisfaction of TNGGP managers and partners is quite satisfying because the results of the collaboration in ecotourism management can provide benefits for both parties. The budget harmonization evaluation effort was successful by selecting a priority program of activities from the RPJP document to an RKT and collaborating with outsiders in managing ecotourism.*

*Keywords:* Budget, ecotourism, evaluation, Gunung Gede Pangrango National Park (TNGGP), mechanism, regulations

**EVALUASI ANGGARAN PROGRAM EKOWISATA  
DI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

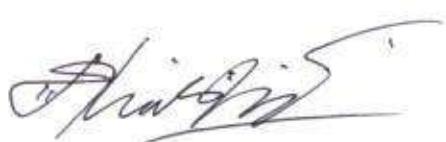
**DESTY SUNJA PURNAMA**

Skripsi  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Kehutanan  
pada  
Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

**DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA  
FAKULTAS KEHUTANAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2019**

Judul Skripsi: Evaluasi Anggaran Program Ekowisata  
di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango  
Nama : Desty Sunja Purnama  
NIM : E34150027

Disetujui oleh



Dr. Ir. Tutut Sunarminto, Msi  
Pembimbing I



Dr. Ir. Harnios Arief, MScF  
Pembimbing II

Diketahui oleh



Tanggal Lulus: 23 SEP 2019

## PRAKATA

Puji dan syukur terpanjatkan kehadirat kepada Allah SWT atas segala segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memudahkan penulis untuk menyelesaikan penelitian sampai dengan penulisan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi dari pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada bulan April-Agustus 2019. Selanjutnya hasil yang diperoleh dianalisis menjadi skripsi dengan judul Evaluasi Anggaran Program Ekowisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Abah Sunardi dan Ibu Yeni sebagai orang tua penulis yang telah memberikan segala bentuk dukungan hingga penulis sampai pada tahap ini. Kedua kalinya penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Tutut Sunarminto, MSi dan Dr. Ir. Harnios Arief, MScF sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan pembelajaran terkait penelitian, sikap dan perilaku. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Eka Dana Prabowo, Shut MSi dan Joko Mijiarto, Shut MSi yang telah memberikan saran dan nasihat dalam penelitian. Terima kasih penulis ucapkan kepada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang telah memberikan fasilitas untuk penulis mendapatkan data penelitian. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada Rumah Quran Daarut Tarbiyah, Desi Khoirunissa Rahayu Ningtyas, S.KH, Keluarga *Eusideroxylon zwageri* yang telah menyertai hingga tahap ini.

Bogor, September 2019

*Desty Sunja Purnama*

## DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan Penelitian	2
Manfaat Penelitian	2
Kerangka Pemikiran	3
METODE PENELITIAN	4
Lokasi dan Waktu	4
Alat dan Subjek	4
Jenis Data	4
Metode Pengambilan Data	4
Analisis Data	5
HASIL DAN PEMBAHASAN	7
Kondisi Umum Penelitian	7
Mekanisme Perencanaan dan Penggunaan Anggaran Ekowisata	7
Mengukur Tingkat Kesesuaian Sistem Anggaran Ekowisata	16
Menilai Upaya Evaluasi Harmonisasi Anggaran Ekowisata	18
SIMPULAN DAN SARAN	21
Simpulan	21
Saran	21
LAMPIRAN	22
RIWAYAT HIDUP	23

## **DAFTAR TABEL**

1 Jenis dan cara pengumpulan data	4
2 Rentang skala perhitungan	6
3 Rincian anggaran ekowisata	8
4 Rincian persentase anggaran ekowisata	8
5 Anggaran perencanaan ekowisata	11
6 Anggaran pengembangan sumberdaya manusia	12
7 Anggaran promosi ekowisata	13
8 Anggaran pembangunan sarana prasarana	14
9 Anggaran pemeliharaan kegiatan ekowisata	16
10 Persepsi pengelola TNGGP terhadap pengelolaan ekowisata	17
11 Persepsi terhadap pengelola atau mitra	18

## **DAFTAR GAMBAR**

1 Kerangka Pikir	3
2 Mekanisme pengajuan anggaran Kemenkeu	9
3 Mekanisme pengajuan anggaran SBSN	10

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1 Dokumentasi Penelitian	22
--------------------------	----

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Salah satu cara untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja organisasi atau lembaga yaitu melalui kinerja anggaran. Melalui pembiayaan anggaran, kinerja anggaran menjadi sangat penting dalam pengelolaan kawasan konservasi karena menjadi tolak ukur keberhasilan tercapainya kegiatan yang sudah direncanakan. Indonesia menganut sistem pembagian anggaran melalui hasil kinerja sebagai output. Asmokol dan Hindri (2006) menjelaskan beberapa karakteristik kunci dalam penganggaran berbasis kinerja, yaitu pengeluaran anggaran didasarkan pada *outcome* yang ingin dicapai, adanya hubungan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*) dan *outcome*, adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran dan adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran. Penyusunan anggaran berbasis kinerja mengharuskan adanya instrumen kinerja yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja, Analisis Standar Biaya (ASB), dan standar biaya (Suhadak dan Nogroho 2007).

Pembiayaan sebagai pendanaan dalam pengelolaan kawasan konservasi bersumber dari Menteri Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dirjen PHKA (2006) mengungkapkan minimal anggaran pengelolaan kawasan adalah \$ 20/ha/tahun. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada tahun 2018 mendapatkan anggaran APBN sebesar Rp 53.178.710.000 atau \$ 3.886.480,30 (BBTNGGP 2019). Nominal tersebut sudah mencakup anggaran taman nasional. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa TNGGP sudah cukup memiliki anggaran dalam pengelolaan kawasan. Anggaran yang didapat TNGGP sudah memenuhi nilai nominal yang ditetapkan oleh pemerintah. Anggaran yang didapat TNGGP per tahun tidak selalu sama, anggaran menyesuaikan kebutuhan yang diajukan ke Dirjen KSDAE dan melalui proses penyesuaian kebutuhan yang harus segera ditinjau lanjuti. Anggaran yang telah dimiliki, TNGGP masih memperoleh masalah. Permasalahan berasal dari aktivitas manusia dalam pemanfaatan kawasan sebagai wisata namun masih dapat diantisipasi. Permasalahan di TNGGP dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang semakin meningkat. Berdasarkan data kunjungan tahun 2014-2018, jumlah pengunjung meningkat 174.32%, dengan jumlah rata-rata pengunjung adalah 176.234 orang/bulan. Jumlah pengunjung yang meningkat memberikan dampak negatif terhadap kawasan atau sumberdaya yang dipakai tanpa adanya kontrol jumlah dan waktu kunjungan. Pentingnya penelitian pembiayaan pengusahaan ekowisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dilakukan dengan tujuan dapat mengukur persepsi pengelola terhadap sistem anggaran ekowisata, mekanisme perencanaan dan penggunaan anggaran ekowisata, dan harmonisasi pengaturan penggunaan anggaran ekowisata di TNGGP, sehingga alokasi dana tersebut dapat menjadikan optimasi pengelolaan ekowisata di TNGGP.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah mengevaluasi anggaran program ekowisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango melalui:

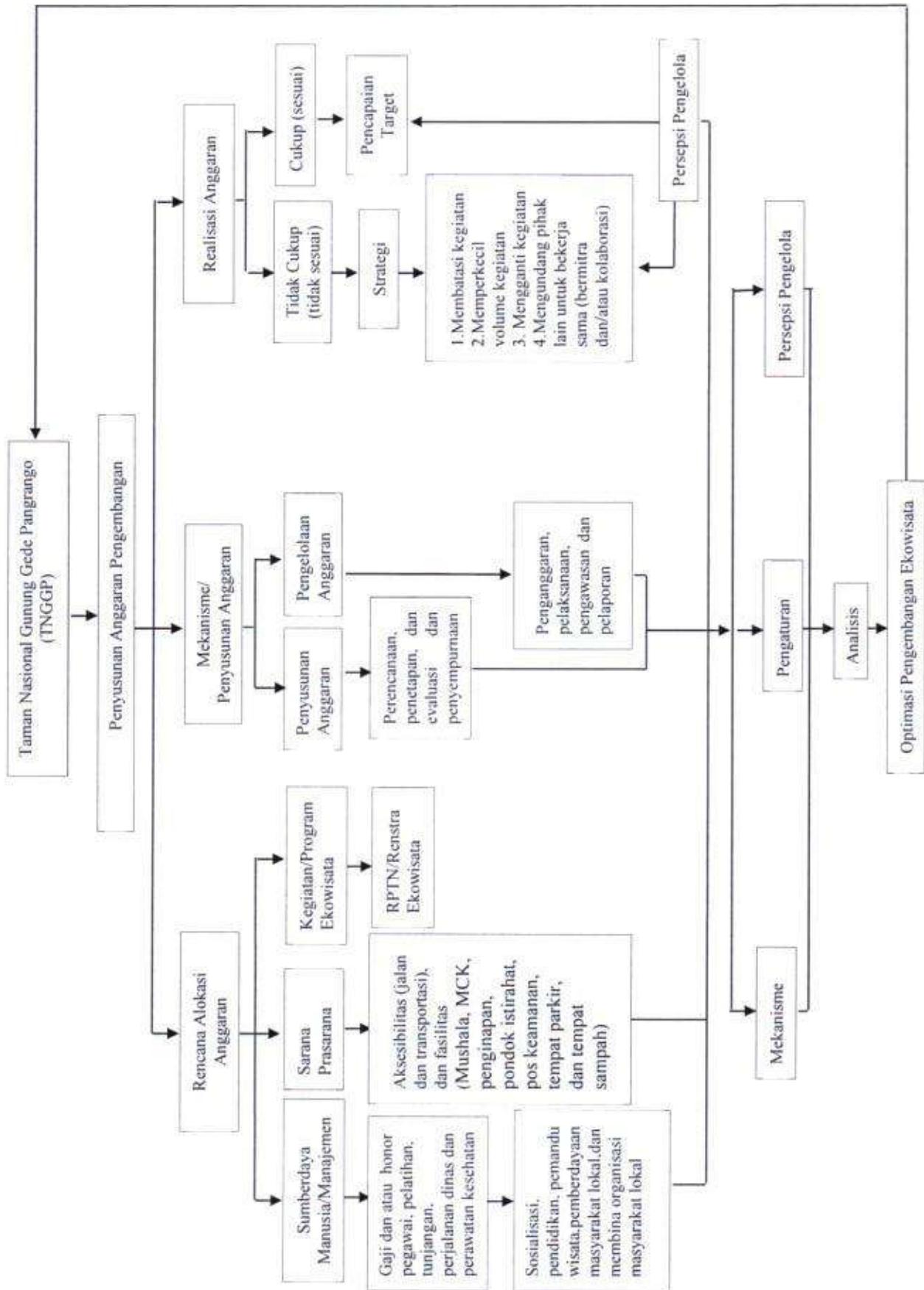
1. Mengevaluasi perbedaan antara perencanaan dan penggunaan anggaran
2. Mengukur tingkat kesesuaian sistem anggaran
3. Menilai upaya evaluasi harmonisasi anggaran

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah memberikan informasi data terkait anggaran pengelolaan ekowisata sehingga dapat membantu pengelolaan ekowisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

### **Kerangka Pemikiran**

Pelaksanaan serangkaian kegiatan ekowisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di jelaskan pada Gambar 1. Perencanaan dan penggunaan anggaran yang digunakan dalam pembiayaan ekowisata. Anggaran merupakan aspek penting pada manajemen kelembagaan yang menjadi syarat pengembangan dan pengelolaan. Anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu periode di masa yang akan datang. Penyusunan anggaran kebutuhan ekowisata di taman nasional meliputi beberapa aspek, yaitu rencana alokasi anggaran, mekanisme atau penyusunan anggaran dan realisasi anggaran. Aspek-aspek tersebut akan menggambarkan perjalanan anggaran akan digunakan. Persepsi pengelola di balai Taman Nasinal Gunung Gede Pangrango dan setiap resort ekowisata dibutuhkan dalam pengelolaan ekowisata dengan tujuan memberikan kekurangan dan kelebihan dari sistem anggaran dan pembiayaan yang berlaku. Peraturan yang digunakan akan menyesuaikan kebutuhan pembiayaan anggaran ekowisata.



Gambar 1 Kerangka Pikir

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Waktu penelitian dalam pengambilan data dilakukan pada tanggal 22 April – 01 Agustus 2019.

### Alat dan Subjek

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, perekam suara, panduan wawancara, kuesioner dan kamera. Subjek penelitian berjumlah sepuluh orang dari pengelola TNGGP dan tiga mitra kerja sama ekowisata.

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah data pokok dan penunjang. Data pokok didapat dari wawancara pengelola, kuesioner, dan observasi lapang non partisipasi sedangkan data penunjang didapat dari studi literatur. Matriks pengumpulan data disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jenis dan cara pengumpulan data

Jenis Data	Data yang diambil	Cara Pengumpulan Data	Analisis Data
Pokok	Peraturan terkait penggunaan ekowisata	Wawancara	Analisis isi dan deskriptif
	Mekanisme perencanaan/pengajuan anggaran	Wawancara	Analisis isi dan deskriptif
	Mekanisme penggunaan anggaran	Wawancara	Analisis deskriptif
	Persepsi pengelola ekowisata	Kuesioner	Skala Likert
	Laporan kegiatan pendapatan ekowisata	Wawancara	Analisis isi dan deskriptif
	Jumlah kunjungan dari ekowisata	Wawancara	Analisis isi dan deskriptif
	Jumlah kecelakaan	Wawancara	Analisis isi dan deskriptif
	Tapak-tapak wisata	Studi literatur dan observasi lapang non partisipatif	Analisis deskriptif
Penunjang			

### Metode Pengambilan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner, observasi lapang non partisipasi, studi literatur dan analisis data yang dijelaskan sebagai berikut:

#### Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur yang dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) dimana

pengelola sebagai narasumber dipandu dalam diskusi oleh peneliti secara terbuka (Sutopo 2006).

### **Kuesioner**

Kuesioner digunakan untuk mengetahui persepsi sistem alokasi dana dan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan dari pihak luar. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner pola pertanyaan berskala (rating) yang berupa pilihan atas suatu jawaban yang telah ditentukan berdasarkan Skala Likert. Kuesioner pola pertanyaan berskala digunakan untuk mengetahui persepsi terkait alokasi anggaran sebagai perwujudan kegiatan dalam pengelolaan TNGGP.

### **Observasi Lapang Non Partisipan**

Penelitian Altinay dan Paraskevas (2008) menjelaskan bahwa kegiatan observasi lapangan non partisipan merupakan teknik observasi lapangan dengan langsung melihat kondisi yang sebenarnya dan tidak terlibat langsung ke dalam pengelolaan. Observasi non partisipan melalui pengamatan langsung, dilakukan dengan tujuan mengamati kegiatan pengelolaan ekowisata oleh pihak TNGGP yang diasumsikan sebagai perwujudan penyelenggaraan anggaran. Observasi dilakukan pada empat resort, yaitu resort Mandalawangi, Selabintana, Situgunung dan resort Bodogol.

### **Studi Literatur**

Penelitian Indrus (2009) mengungkapkan penelusuran literatur dilakukan sebagai langkah awal dalam penelitian dan diperlukan untuk membantu analisis data. Studi literatur dilakukan melalui penelusuran yang berasal dari Undang-Undang, peraturan-peraturan terkait anggaran, karya ilmiah, buku maupun jurnal yang terkait dengan ekowisata.

### **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, analisis deskriptif dan menggunakan skala Likert.

### **Deskriptif**

Analisis deskriptif merupakan Pengambilan data melalui wawancara dan kuesioner persepsi sistem anggaran pihak pengelola TNGGP, diambil dari analisis laporan, dokumen, dan peraturan-perturan yang TNGGP gunakan dalam mengelola anggaran ekowisata.

### **Skala Likert**

$$\frac{m - n}{b}$$

Keterangan:

Rs: Rentang skala

m : Skor tertinggi dari pengukuran

n : Skor terendah dari pengukuran

b : Banyak kelas interval

**Tabel 2 Rentang skala perhitungan**

<b>Skala</b>	<b>Aspek Penilaian</b>	<b>Nilai</b>
1-1.86	Sangat tidak puas	1
1.87-2.73	Tidak puas	2
2.74-3.59	Agak tidak puas	3
3.60-4.46	Cukup	4
4.47-5.33	Agak puas	5
5.33-6.19	Puas	6
6.20-7	Sangat puas	7

Rentang skala yang digunakan yaitu 1-7, dengan kriteria pada Tabel 2. Rentang yang digunakan merupakan salah satu bentuk pembatas kategori yang ditentukan. Rentang skala dalam aspek penilaian dapat berubah, sesuai konten dari pernyataan persepsi. Aspek penilaihan seperti sangat tidak puas/sangat tidak baik/sangat tidak tinggi, tidak puas/tidak baik/tidak tinggi, agak tidak puas/agak tidak baik/agak tidak tinggi, cukup, agak puas/agak baik/agak tinggi, puas/baik/tinggi, dan sangat puas/sangat baik/sangat tinggi. Aspek penilaian yang digunakan tidak selalu sama Penggunaan rentang 1-7 ini dikarenakan masyarakat Indonesia terkenal mengungkapkan pendapat, sehingga dikenal dengan tingkatan bahasa. Hal tersebut mengartikan bahwa masyarakat indonesia memiliki pemikiran dan penilaian yang panjang dalam mengungkapkan suatu pendapat (Avenzora 2008).

### **Analisis Isi**

Analisis isi merupakan teknik penelitian dengan tujuan mendapatkan gambaran isi dan mendapatkan inferensi dari isi tersebut. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi secara sistematis komunikasi yang tampak atau terlihat, dilakukan secara objektif, valid, reliabel dan dapat direplikasi (Hendriyani 2013). Analisis isi digunakan untuk menganalisa dokumen RKAKL tahun anggaran 2018 dan peraturan penggunaan anggaran ekowisata yang digunakan oleh TNGGP.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Umum Penelitian**

Secara geografis Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) terletak antara 106°51'-107°02'BT dan 6°41'-6°51'LS. Secara administratif Taman Nasional ini termasuk dalam wilayah tiga Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Kawasan TNGGP merupakan rangkaian gunung berapi, terutama Gunung Gede (2 958 m dpl) dan Gunung Pangrango (3 019 m dpl) yang merupakan dua dari tiga gunung berapi tertinggi di Jawa Barat. Topografinya bervariasi dari landai hingga bergunung, dengan kisaran ketinggian antara 700m dan 3000 m di atas permukaan laut. Jurang dengan kedalaman sekitar 70m banyak dijumpai di dalam kedua kawasan tersebut. Sebagian besar kawasan TNGGP merupakan dataran tinggi tanah kering dan sebagian kecil merupakan daerah rawa. Kemiringan lereng sekitar 20-80%. Curah hujan cukup tinggi dengan rata-rata tahunan berkisar antara 3 000– 4 200 mm, menyebabkan kawasan ini merupakan salah satu daerah terbasah di Pulau Jawa. (BBTNGGP 2015).

TNGGP memiliki program kerja besar pada tahun 2018 yaitu kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam, pengelolaan kawasan konservasi, konservasi spesies dan genetik, kegiatan dukungan manajemen, dan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan Konservasi (BBTNGGP 2019). Salah satu pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi adalah ekowisata. TNGGP mempunyai potensi ekowisata yang tinggi antara lain keindahan alam, gejala alam, keutuhan sumberdaya, keanekaragaman hayati, keunikan alam, dan situs budaya.

Anggaran kegiatan ekowisata di TNGGP meliputi anggaran pada tahap perencanaan, pengembangan sumberdaya manusia, promosi, pembangunan sarana prasarana dan anggaran pemeliharaan ekowisata. Pada tahun 2018 terfokuskan membangun sarana prasarana di tiga resort. Pembangunan sarana prasarana dilakukan untuk mendukung kegiatan ekowisata. Jumlah kunjungan pada tahun 2018 sebesar 251 222 orang/bulan. Jumlah kecelakaan ringan sebesar 44 dan kecelakaan berat 2 kejadian (BBTNGGP 2019).

### **Mekanisme Perencanaan dan Penggunaan Anggaran Ekowisata**

Pengajuan anggaran Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada tahun 2018 yang dijabarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/L) senilai Rp 53.178.710.000. Anggaran yang didapat TNGGP pada tahun 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN terdiri dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (BBTNGGP 2019). Rincian anggaran pada Tabel 3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 menjelaskan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpjakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997

menjelaskan PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP meliputi penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, hibah yang merupakan hak pemerintah, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Penggunaan anggaran PNBP dilakukan setelah ada surat edaran dari Dirjen KSDAE. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 menjabarkan tentang SBSN. SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Anggaran dari SBSN digunakan pada pembangunan sarana prasarana wisata alam ada di tiga resort TNGGP. Penggunaan anggaran dari Rupiah Murni merupakan anggaran kegiatan yang pasti dilakukan seperti pembayaran gaji dan tunjangan.

Tabel 3 Rincian anggaran ekowisata

Sumber Dana	Alokasi	Realisasi		
		Rp.	%Keu	%Fisik
Rupiah Murni (RM)	25.786.698.000	22.672.840.929	87,93	100
PNBP	2.686.000.000	2.552.993.699	95,05	100
SBSN	25.382.806.000	25.051.366.900	98,69	100
Jumlah	51.172.190.000	50.277.201.528	98,26	100

Sumber BBTNGGP tahun 2019

Penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh TNGGP sebesar 98,26%. Persentase tersebut sudah melewati batas minimal penyerapan anggaran dana yaitu 97%. Target PNBP Balai Besar TNGGP untuk tahun 2018 adalah Rp. 2.300.000.000, nominal tersebut sudah terlampaui dengan realisasi sebesar Rp. 6.119.918.223 atau 266,08%. Penyerapan dana secara optimal yang dilakukan TNGGP melalui pengalokasian dana dengan benar, menyatakan bahwa TNGGP memiliki kinerja anggaran yang bagus (BBTNGGP 2019). Ekowisata memiliki 53% dari keseluruhan anggaran pada tahun 2018 senilai Rp 28.682.569.000. Anggaran dana ekowisata terbagi menjadi dua yaitu, anggaran yang berasal dari SBSN senilai Rp 25.382.806.000 dan anggaran dari RM dan PNBP senilai Rp. 2.268.413.000 tertuang dalam Tabel 4.

Tabel 4 Rincian persentase anggaran ekowisata

Sumber Dana	Realisasi	
	Rp.	%Keu
Anggaran pada tahap perencanaan	101.413.000	0,35
Pengembangan sumberdaya manusia	281.560.000	0,98
Promosi	646.010.000	2,26
Pembangunan sarana prasarana	25.382.806.000	88,49
Pemeliharaan ekowisata	2.270.780.000	7,92
Jumlah	28.682.569.000	100

Keseluruhan pengajuan anggaran APBN berasal dari Menteri Keuangan. Penyusunan, penetapan dan pemeriksaan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pengajuan anggaran dari SBSN khusus pembiayaan proyek pembangunan, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri

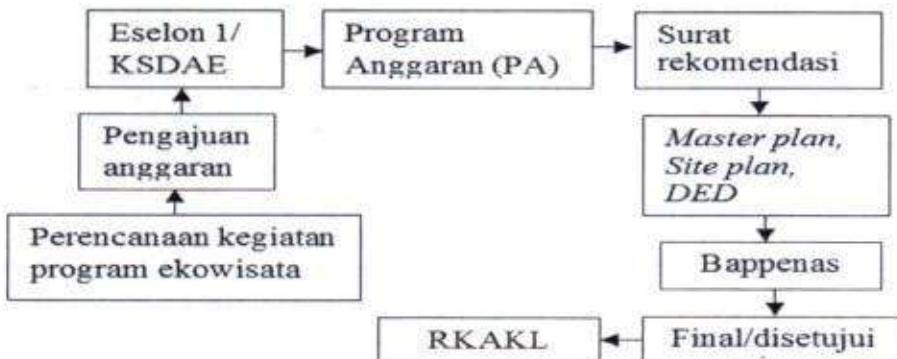
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pengajuan anggaran yang berasal dari Bappenas dikarenakan TNGGP akan mengadakan pembangunan sarana prasara untuk mendukung kegiatan ekowisata. Mekanisme pengelolaan anggaran SBSN diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Pengajuan anggaran yang dilakukan satu tahun sebelum masa pelaksanaan yaitu tahun 2017. Pengajuan anggaran melalui Bappenas dialokasikan ke tiga resort yang membutuhkan pembangunan sarana prasara untuk menunjang kegiatan ekowisata. Tiga resort tersebut yaitu resort Mandalawangi, Selabintana dan Situgunung.

Mekanisme perencanaan pengajuan anggaran APBN TNGGP berawal dari perencanaan program kegiatan. Implementasi program kegiatan yang berada di Rencana Pembangunan Rangka Panjang (RPJP) yang kemudian dituangkan ke Rencana Keja Tahunan (RKT) tidak semua terealisasikan. Perencanaan program kegiatan disusun pada Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN). RPTN tertuang di tahun 1995-2020 atau selama 25 tahun yang berada di RPJP. RPTN program kegiatan akan dituangkan ke RKT pada setiap tahunnya. Ada beberapa implementasi perencanaan program kegiatan yang berada di RPTN dituangkan menjadi RKT ini melalui proses penyesuaian dengan program prioritas dan dengan kebijakan baru. Penyesuaian juga diikuti perubahan perencanaan anggaran. Penyesuaian anggaran yang tersedia akan direalisasikan melalui program kegiatan prioritas yang ada di RKT. Pengajuan usulan anggaran dari wilayah yang akan di kompilasi di Balai Besar. Perencanaan anggaran yang sudah ditetapkan oleh BBTNGGP kemudian diserahkan ke Direktorat Jendral KSDAE yang akan melalui rapat koordinasi teknis bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya. Sebelum adanya pengajuan anggaran dari UPT, Dirjen KSDAE memberikan surat edaran di pertengahan tahun tentang pagu yang akan didapat dari masing-masing UPT. Hal tersebut dilakukan agar masing-masing UPT dapat mengontrol anggaran yang diajukan. Setelah mendapatkan hasil rapat koordinasi teknis tentang sejumlah anggaran yang didapat dari masing-masing UPT, Dirjen KSDAE melaporkan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil pagu yang didapat dari Dirjen KSDAE, kemudian KLHK melaporkan ke kementerian Keuangan. Setelah semua selesai, kepala UPT akan serah terima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) wilayah (UU No 17 tahun 2003). Mekanisme pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan Negara tertuang pada Gambar 2.



Gambar 2 Mekanisme pengajuan anggaran Kemenkeu

Anggaran SBSN yang dikelola Bappenas memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu *Master Plan*, *Site Plan*, *Detail Engineering Design* (DED). *Master Plan*, *Site Plan*, *Detail Engineering Design* (DED) merupakan isi dari perencanaan kegiatan ekowisata dan perencanaan anggaran berupa paket pekerjaan pembangunan sarana prasarana. Perencanaan kegiatan paket pembangunan sarana prasarana sudah dilakukan sejak tahun 2015. Pengajuan anggaran SBSN atas persetujuan Eselon satu yaitu Direktur Jendral Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekowisata (Dirjen KSDAE) bagian Program Anggaran (PA). Setelah mendapat persetujuan pengajuan anggaran, Dirjen KSDAE memberikan surat rekomendasi untuk dibawa ke Bappenas. Selama proses pembahasan *Master Plan*, *Site Plan*, *Detail Engineering Design* (DED) yang diusulkan oleh TNGGP kepada Bappenas, setidaknya tiga kali rapat dalam dua tahun untuk menghasilkan rumusan anggaran SBSN. Pada tahun 2017 anggaran SBSN disetujui, penyesuaian harga dilakukan agar mengetahui pembaharuan harga. Setelah disetujui oleh Bappenas atas pengajuan anggaran, terbentuk RKAKL pada bulan Desember tahun 2017 (UU No 19 tahun 2008). Mekanisme pengajuan anggaran SBSN tertuang pada Gambar 3.



Gambar 3 Mekanisme pengajuan anggaran SBSN

Pembagian anggaran akan dijelaskan menurut manajemen pengelolaan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian (Yunus A 2014). Penggunaan anggaran ekowisata dalam RKT yang terealisasikan meliputi anggaran pada tahap perencanaan, pengembangan sumberdaya manusia, promosi, pembangunan sarana prasarana dan anggaran pemeliharaan ekowisata.

Perencanaan anggaran ekowisata TNGGP dimulai dari penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi. Dokumen penyusunan dan pengesahan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi mencakup seluruh pengelolaan taman nasional. Salah satu pengelolaan kawasan konservasi adalah wisata alam. Anggaran perencanaan direalisasikan melalui survey lapangan dengan tujuan dapat mengumpulkan dan *updating* data dan informasi lapangan untuk dijadikan bahan pertimbangan penentu atau penetapan desain pemanfaatan kawasan sesuai dengan karakteristiknya. Survey lapangan dilakukan pada zona pemanfaatan untuk menentukan ruang publik dan ruang usaha. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (2011) zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata. Ruang usaha penyediaan

sarana wisata alam akomodasi dapat dicadangkan dalam beberapa blok dengan ukuran luas tidak lebih dari 10 % dari areal yang dibebani izin, sedangkan ruang publik antara lain meliputi keberadaan obyek daya tarik wisata alam, jalur lintasan atau aktifitas satwa, lokasi cagar budaya atau situs sejarah. Dengan berbagai potensi alam yang ada di TNGGP survey lapang diperlukan karena adanya penataan zonasi untuk pembagian ruang kegiatan (Junaidi 2008). Pembahasan hasil survei desain tapak dilakukan setelah survei lapangan selesai dilakukan. Pembahasan hasil survei desain tapak dilakukan bersama *Stakeholder*. *Stakeholder* yang ikut membahas dari hasil survei lapang adalah pemerintah daerah, masyarakat, LSM wisata, pihak swasta dan pengelola TNGGP sendiri. Diperlukannya pembahasan hasil survei ini agar dalam pengumpulan data, data dapat dikoreksi sehingga data akurat dan valid. Rincian anggaran perencanaan pada Tabel 5.

Tabel 5 Anggaran perencanaan ekowisata

Kode	Program/Kegiatan/Output	Jumlah Biaya (Rp)
5426.001 053	Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat[Base Line] Penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi	1.622.005.000 135.000.000
5426.016 054	Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat [Base Line] Peningkatan kapasitas SDM	1.467.582.000 839.813.000
M	Survey lapangan Penyusunan dan Review desain tapak	47.483.000
N	Pembahasan hasil survei desain tapak	53.930.000
Jumlah		101.413.000

TNGGP dalam melakukan pengelolaan kawasan tidak hanya pada pengelolaan fisik kawasan tetapi juga melalui pengembangan sumberdaya manusianya. Pengembangan sumberdaya manusia ini dilakukan pada pengelola TNGGP sendiri dan masyarakat setempat (Tabel 6). Pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan pada pengelola TNGGP yaitu studi banding ekowisata dan pendampingan kegiatan Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol (PPKAB). Studi banding ekowisata dan pendampingan kegiatan PPKAB merupakan kegiatan untuk mendukung role model PPKAB yang dilakukan pada Sukabumi tujuan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia atau pengelola TNGGP dalam pengelolaan wisata alam. Pengembangan sumberdaya manusia yang ditujukan kepada masyarakat disekitar kawasan yang berada di desa penyanga dengan tujuan agar dapat memberdayakan masyarakat sekitar. Pernyataan tersebut memiliki arti yang sama Dirjen PHKA (2008) tentang pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan pada daerah penyanga. Pengembangan sumberdaya masyarakat ini memiliki tujuan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan dengan menggunakan sumberdaya alam yang ada di PPKAB. Melalui pelatihan pembuatan kuliner khas Bodogol, pelatihan fotografi, pelatihan interpreter, dan pelatihan perencanaan modul pendidikan konservasi untuk mendukung role model PPKAB. Pelatihan pembuatan kuliner khas bodogol dibentuk agar wisatawan tertarik untuk mengunjungi kampung Bodogol dengan mengetahui budaya lokal. Pelatihan fotografi dan pelatihan interpreter dilakukan untuk mendukung minat khusus yang berada di PPKAB. Pelatihan kuliner, fotografi, dan interpreter dengan narasumber yang sama yaitu Nurdin Rozak seorang konsultan ekowisata

dari Baluran *ecologic*. Pelatihan perencanaan modul pendidikan konservasi bertujuan untuk membuat *story land* dari wisata minat khusus untuk mendukung role model PPKAB. Pelatihan penangkaran Bunga Hoya dilakukan dengan teknik stek. Stek merupakan metode pertumbuhan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Bunga Hoya yang berada di dalam kawasan yaitu *Hoya multiflora*, tetapi bunga Hoya yang pertama kali digunakan dalam penyetekan adalah *Hoya diversifolia* yang bersal dari luar kawasan. Narasumber dalam pelatihan penangkaran Bunga Hoya adalah Sri Rahayu dari LIPI. Semua pelatihan ditujukan kepada petugas resort Bodogol, khususnya masyarakat dan dilakukan di resort Bodogol dan praktiknya dilakukan di PPKAB. Masyarakat yang menjadi objek pelatihan ini berada di kampung Bodogol, Rengkong, Ciwaluh, dan kampung Tangkil. Pembinaan forum jasa wisata diberikan kepada masyarakat sekitar kawasan yang mempunyai wirausaha yang berada di bidang PTN wilayah satu, Cianjur. Pembinaan ini dilakukan agar masyarakat mengerti tentang wisata alam. Masyarakat juga berperan dalam pelayanan wisata alam di TNGGP melalui penjagaan di pelayanan pengunjung *visitor centre* dan pintu masuk wisata pada hari libur.

Tabel 6 Anggaran pengembangan sumberdaya manusia

Kode	Program/Kegiatan/Output	Jumlah Biaya (Rp)
5426.007	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi taman nasional [Base Line]	221.665.000
051	Inventarisasi dan verifikasi	221.665.000
F	Studi banding ekowisata dan pendampingan kegiatan PPKAB untuk mendukung role model PPKAB	96.000.000
5426.007	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi taman nasional [Base Line]	221.665.000
051	Inventarisasi dan verifikasi	221.665.000
A	Pelatihan Pembuatan kuliner khas Bodogol untuk mendukung role model revitalisasi PPKAB	13.512.000
B	Pelatihan penangkaran bunga hoya oleh masyarakat untuk mendukung role model revitalisasi PPKAB	13.512.000
C	Pelatihan fotografi untuk mendukung role model revitalisasi PPKAB	14.412.000
D	Pelatihan interpreter dan penyusunan code of conduct interpreter masyarakat untuk mendukung role model revitalisasi PPKAB	20.112.000
E	Pelatihan Perencanaan Modul Pendidikan Konservasi untuk mendukung role model PPKAB	20.112.000
5426.008	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi taman nasional [Base Line]	1.063.245.000
052	Pembentukan dan pendampingan kelompok	888.000.000
D	Pembinaan forum jasa wisata	7.900.000
5426.016	Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat [Base Line]	1.467.582.000
054	Peningkatan kapasitas SDM	839.813.000
P	Pelayanan Pengunjung di Visitor Centre dan Pintu Masuk Wisata pada Hari Libur	96.000.000
Jumlah		281.560.000

Promosi merupakan kegiatan terpenting dalam pengembangan wisata alam. Tjiptono F (2004) mengungkapkan promosi berperan dalam memperkenalkan, membentuk dan mengingatkan sesuatu yang akan dikembangkan. Promosi yang dilakukan TNGGP melalui pameran cagar biosfer. Menurut PP No 28 Tahun

2011 Cagar biosfer adalah suatu kawasan ekosistem yang berfungsi sebagai keseimbangan antara melestarikan keanekaragaman hayati, pembangunan ekonomi dan budaya. Pameran cagar biosfer ini menjelaskan bahwa TNGGP sebagai kawasan yang dapat memberikan nilai lebih terhadap lingkungan sekitar. Melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang berada di zona inti, mengadakan rekreasi, penelitian, pendidikan pada zona penyanga, dan melakukan kegiatan pertanian, pemukiman dan pemanfaatan lainnya yang berada di zona transisi. Pameran KSDA tingkat provinsi/ nasional adalah pemaparan pengelolaan taman nasional, pendidikan, pemanfaatan, perlindungan . *Scholl visit, visit to school, visit to pesantren, goes to campus*, kemah konservasi tingkat Kabupaten/Kota, jambore hari konservasi alam nasional merupakan sarana promosi lewat pendidikan konservasi lingkungan (dikoling). Dikoling merupakan upaya peningkatan kesadaran, kemampuan dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian sumberdaya hutan yang ada di kawasan. Pemaparan pameran KSDA juga tedapat pemaparan wisata alam TNGGP. Peningkatan administrasi pelayanan pendakian dilakukan di kantor Balai Besar dan bidang wilayah dua Sukabumi. Peningkatan administrasi merupakan pengalokasian honor pegawai yang menangani administrasi pendakian dan pembuatan spanduk dan pengadaan sarana prasarana pendakian. Rincian anggaran promosi pada Tabel 7.

Tabel 7 Anggaran promosi ekowisata

Kode	Program/Kegiatan/Output	Jumlah Biaya (Rp)
5426.008 052	Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi taman nasional [Base Line]	1.063.245.000
A	Pembentukan dan pendampingan kelompok	888.000.000
G	School visit	109.510.000
H	Visit to school	15.800.000
I	Visit to pesantren	23.700.000
J	Goes to campus	15.800.000
5426.016 054	Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat [Base Line]	23.700.000
F	Peningkatan kapasitas SDM	1.467.582.000
G	Kemah Konservasi Tingkat Kabupaten/Kota	839.813.000
5426.021 054	Jambore Hari Konservasi Alam Nasional	51.600.000
A	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Taman Nasional [Base Line]	61.500.000
D	Promosi wisata Taman Nasional	2.431.904.000
A	Pameran KSDA Tingkat Provinsi/ Nasional	1.621.510.000
D	Peningkatan Administrasi Pelayanan Pendakian di Kantor Balai Besar	237.200.000
	Jumlah	107.200.000
		646.010.000

Pembangunan sarana prasarana di tiga resort TNGGP yaitu resort Mandalawangi, Selabintana dan Situgunung memiliki 13 paket pekerjaan dengan nilai Rp 25.382.806.000 bersumber dari anggaran SBSN tertera pada tabel 8. Paket pekerjaan pembangunan sarana prasana dibagi menjadi tiga yaitu tiga paket Mandalawangi, lima paket Selabintana, dan lima paket Situgunung. Pembagian paket hanya untuk membedakan bagian pekerjaan. Pengerjaan paket yang memiliki nominal minimal dari Rp 200.000.000 harus di lelang. Pekerjaan dilakukan secara lelang akan di *post* secara *online* di Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 9 Tahun 2015 LPSE adalah sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Rincian anggaran pembangunan sarana prasarana pada Tabel 8.

Tabel 8 Anggaran pembangunan sarana prasarana

Kode	Program/Kegiatan/Output	Jumlah Biaya (Rp)
5426.031	Sarana Prasarana Ekowisata 3 Taman Nasional Model SBSN [Base Line]	25.382.806.000
051	Pembangunan Sarana Prasarana Ekowisata Model SBSN	25.382.806.000
A	Sarpras Komplek Wisata Alam Mandalawangi Paket I	2.014.430.000
B	Sarpras Komplek Wisata Alam Mandalawangi Paket II	1.725.805.000
C	Sarpras Komplek Wisata Alam Mandalawangi Paket III	616.880.000
D	Sarpras Komplek Wisata Alam Situgunung Paket I	1.650.940.000
E	Sarpras Komplek Wisata Alam Situgunung Paket II	1.841.296.000
F	Sarpras Komplek Wisata Alam Situgunung Paket III	1.974.783.000
G	Sarpras Komplek Wisata Alam Situgunung Paket IV	2.266.231.000
H	Sarpras Komplek Wisata Alam Situgunung Paket V	2.038.642.000
I	Sarpras Komplek Wisata Alam Selabintana Paket I	1.929.453.000
J	Sarpras Komplek Wisata Alam Selabintana Paket II	2.012.474.000
K	Sarpras Komplek Wisata Alam Selabintana Paket III	2.038.864.000
L	Sarpras Komplek Wisata Alam Selabintana Paket IV	1.338.825.000
M	Sarpras Komplek Wisata Alam Selabintana Paket V	1.134.183.000
N	Penataan talud di resort Mandalawangi dan Pekerjaan jalan akses danau Situgunung	1.300.000.000
O	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung komplek wisata alam proyek SBSN	1.150.000.000
P	Pengadaan Penguat Signal Wi-fi di komplek wisata alam Selabintana	150.000.000
Q	Pembuatan pintu pagar gerbang di Selabintana dan Pekerjaan pembangunan musholla danau Situgunung	200.000.000
Jumlah		25.382.806.000

Paket pekerjaan sarana prasarana yang diunggah melalui LPSE akan ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin bergabung dalam pekerjaan pembangunan sarana prasarana. Perusahaan yang mendaftar harus memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan oleh pihak TNGGP. Syarat yang diberikan adalah perusahaan harus memiliki ketentuan yang ada di dokumen perencanaan dan memberikan tawaran paling murah terhadap paket pekerjaan sarana prasarana yang diunggah oleh TNGGP. Setelah perusahaan mendaftar, Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) akan memeriksa ketentuan kelayakan perusahaan. Perusahaan yang terpilih sebagai pemenang ada dua yaitu pemenang dan pemenang cadangan. Pemenang cadangan akan diberikan kesempatan melakukan pekerjaan pembangunan ketika pemenang pertama mengundurkan diri. Setelah pemenang ditetapkan, pemenang akan diberikan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). SPK adalah surat yang mengatur mekanisme, hak, dan kewajiban membangun sarana prasarana wisata alam dengan menggunakan uang negara. Suplayer atau perusahaan yang telah memenangkan lelang akan didaftarkan melalui aplikasi Sistem Pengambilan Anggaran Negara (SPAN) yang didaftarkan oleh TNGGP. Pembangunan minimal 55% dari pekerjaan, konsultan pengawas akan memberitahu kepada TNGGP. Melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang

diajukan TNGGP kepada KPPN yang berisikan biodata perusahaan dan pekerjaan yang sudah dilakukan, pembayaran yang akan diberikan kepada perusahaan senilai 50%. Sisa pembayaran akan diberikan setelah semua pekerjaan selesai dikerjakan. Paket yang di *upload* melalui LPSE menyisakan dana, dikarenakan salah satu syaratnya dilakukan penawaran oleh perusahaan, maka TNGGP membuat paket lagi agar dana terserap minimal 97%. Paket yang diajukan kembali yaitu penataan talud di Resort Mandalawangi dan pekerjaan jalan akses Danau Situgunung, pengadaan sarana dan prasarana pendukung komplek wisata alam proyek SBSN, dan pembuatan pintu pagar gerbang di Selabintana dan pekerjaan pembangunan Musholla danau Situgunung. Mekanisme pengadaan paket pekerjaan lelang yang menggunakan anggaran SBSN diatur oleh PP No 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemeliharaan sarana prasarana sangat penting bagi pemulihan kawasan dari fasilitas rehabilitasi kerusakan lingkungan dikarenakan memberikan (Triutami HW 2009). Patroli pengamanan jalur pendakian dilakukan pada saat akan ditutupnya jalur pendakian. Jadwal penutupan jalur pendakian yaitu pada bulan januari hingga maret dan agustus. Faktor utama dari penutupan jalur pendakian yaitu faktor keamanan dan faktor pemulihhan ekosistem hutan. Penutupan jalur pendakian pada bulan Januari hingga maret dikarenakan musim penghujan. Musim penghujan sering terjadi hujan lebat, kabut dan badai, sehingga dikhawatirkan pengunjung terkena hipotermia. Musim kemarau menjadi penyebab ditutupnya jalur pendakian pada bulan agustus. Penutupan jalur pendakian pada bulan Agustus dikarenakan sumim kemarau yang dikhawatirkan terjadi kebarkaran. Evakuasi kecelakaan pengunjung pendakian dilakukan ketika pendaki memberitahu kepada pihak tim evakuasi terjadi masalah. Rincian anggaran pemeliharaan tertera pada Tabel 9.

Evakuasi pengunjung dilakukan ketika pengunjung melebihi batas waktu kunjungan yang sudah ditentukan. Tim evakuasi bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam melakukan evakuasi. Evakuasi pengunjung wisata di tiga bidang wilayah dilakukan ketika tim evakuasi bidang wilayah tidak mampu untuk mengatasi permasalahan, sehingga tim evakuasi Balai Besar ikut turun dalam menangani permasalahan yang terjadi. Pemeriksaan (*check packing*) sampah barang bawaan pendaki merupakan salah satu manajemen pengelahan sampah. Pemeriksaan barang-barang dilakukan pada saat akan menanjak dan turun. Penanganan sampah pengunjung wisata alam dilakukan dua kali sebulan dan bekerja sama bersama masyarakat sebagai buruh. Rehabilitasi sarana prasana jalan lingkup PPKAB meliputi rehabilitasi *Catwalk*, *Canopy Trail*, jalan tangga menuju asrama, dan rehabilitasi jalan Trail. Rehabilitasi sarana prasana bangunan lingkup PPKAB meliputi rehabilitasi asrama atau *Guest house*. Penyusunan DED revitalisasi PPKAB meliputi honor konsultan. Honor konsultan dibuat karena keikutsertaan konsultan dalam penyusunan DED revitalisasi PPKAB. Biaya pengawas, pengelola teknis dan operasional proyek SBSN merupakan manajemen dari pengawasan SBSN, pengeontrolan kegiatan pembangunan, honor pekerja dan honor pengawas kegiatan pembangunan sarana prasaraana ekowisata (Triutami HW 2009).

Tabel 9 Anggaran pemeliharaan kegiatan ekowisata

Kode	Program/Kegiatan/Output	Jumlah Biaya (Rp)
5426.009	Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan Taman Nasional dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat [Base Line]	1.387.795.000
052	Pembentukan dan Penyegaran Masyarakat Mitra Polhut (MMP)	364.230.000
E	Patroli Pengamanan Jalur Pendakian dan Wisata Alam	32.450.000
056	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait	793.165.000
F	Evakuasi Kecelakaan Pengunjung Pendakian	18.400.000
H	Evakuasi Pengunjung Wisata di 3 Bidang Wilayah	25.200.000
5426.011	Pemulihan Kawasan Konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat	479.673.000
052	Penanaman dalam rangka pemulihan ekosistem	479.673.000
G	Pemeriksaan (check packing) sampah barang bawaan pendaki pendukung ISO 14001:2015	27.000.000
5426.016	Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat [Base Line]	1.467.582.000
054	Peningkatan kapasitas SDM	839.813.000
Q	Penanganan Sampah Pengunjung Wisata Alam	148.000.000
5426.021	Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Taman Nasional [Base Line]	2.431.904.000
052	Pemeliharaan sarana dan prasarana	810.394.000
A	Rehabilitasi Sarpras Jalan Lingkup PPKAB	480.000.000
B	Rehabilitasi Sarpras Bangunan Lingkup PPKAB	250.000.000
G	Penyusunan DED revitalisasi PPKAB	50.000.000
054	Promosi wisata Taman Nasional	1.621.510.000
F	Biaya pengawasan, pengelola teknis, dan operasional proyek SBSN	1.239.430.000
Jumlah		2.270.780.000

#### Mengukur Tingkat Kepuasan Pengelola terhadap Sistem Anggaran Ekowisata

Kepuasan kerja merupakan tingkat emosional seseorang yang mencerminkan perasaan terhadap hasil kerja yang dilakukan (Handoko H 2001). Penilaian kepuasan pengelola terhadap sistem anggaran ekowisata dalam penelitian ini ada dua yaitu kepuasan pengelola TNGGP, dan mitra kerjasama di bidang ekowisata. Tingkat kepuasan sistem anggaran ekowisata meliputi tingkat kepuasan pengelola TNGGP terhadap pengelolaan ekowisata yang telah dilakukan, tingkat kepuasan pengelola TNGGP terhadap kinerja mitra dalam pengelolaan ekowisata, dan tingkat kepuasan mitra terhadap pengelolaan ekowisata yang dilakukan oleh pengelola TNGGP. Pengelolaan ekowisata dilakukan dari perencanaan, pengelolaan anggaran, pencapaian keberhasilan, strategi pengelolaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan pengelola TNGGP.

Perencanaan anggaran sudah tersalur dengan baik, tetapi ada beberapa pengajuan anggaran yang diusulkan dari wilayah untuk keperluan pengembangan sumberdaya wisata alam masih ada yang belum terealisasikan karena anggaran yang diajukan tidak semua didapat. Perencanaan anggaran yang tidak terealisasikan ini dikarenakan ada pemilihan program kegiatan yang menjadi prioritas dalam pengelolaan. Dalam realisasi pengelolaan, TNGGP telah melakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui. Penilaian ini menyesuaikan dari perencanaan anggaran yang direncanakan. Sementara itu,

pencapaian keberhasilan TNGGP program kerja ekowisata sangat baik dari kinerja kerja pengelola. Dari hasil akhir pencapaian keberhasilan wisata alam TNGGP pada tahun 2018 mencapai 266.08% (BBTNGGP 2019). Pencapaian ini didapat karena pembangunan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat meningkatkan PNBP. Strategi pengelolaan ekowisata di TNGGP dengan membatasi waktu wisata dan jumlah pengujung. Membatasi waktu wisata dengan cara menutup kawasan wisata pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Membatasi jumlah kunjungan dengan salah satunya memberikan sistem pendaftaran *online*. Monitoring yang dilakukan TNGGP untuk mendukung pengelolaan ekowisata yaitu memeriksa keadaan tapak wisata atau *hazard*, keadaan sekitar, perubahan bentuk fisik tapak, keadaan sarana prasarana, gangguan alam, gangguan manusia. Evaluasi pengelolaan ekowisata sebagian sudah memenuhi perencanaan anggaran. Skor tingkat kepuasan pengelola TNGGP berada pada Tabel 10.

Tabel 10 Tingkat kepuasan pengelola TNGGP terhadap pengelolaan ekowisata

Elemen persepsi	Skor Persepsi	
	Pengelola terhadap pengelolaan ekowisata	Keterangan
Perencanaan anggaran ekowisata	5.1	Agak baik
Pengelolaan anggaran ekowisata	5.2	Agak baik
Pencapaian keberhasilan ekowisata	5.2	Agak tinggi
Strategi pengelolaan ekowisata	5.0	Agak baik
Monitoring pengelolaan ekowisata	5.1	Agak baik
Evaluasi pengelolaan ekowisata	4.7	Cukup

Tingkat kepuasan pengelola terhadap perencanaan pengelolaan anggaran yang dilakukan mitra melalui persetujuan pengelola TNGGP, pemerintah daerah, masyarakat sekitar dan LSM terkait wisata. Perencanaan melalui survey dan rapat hasil survey untuk menentukan zona manfaat yang akan dibagi menjadi ruang publik dan ruang usaha. Ruang usaha yang digunakan oleh mitra adalah 10% dari kawasan perjanjian. Pengelolaan yang dilakukan oleh mitra pada tahun 2018 tergolong baik, karena memberikan pembangunan sarana prasarana wisata alam yang dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang datang dan/atau memberikan pemeliharaan sarana prasarana wisata alam. Evaluasi TNGGP untuk mitra yaitu masih belum optimal mitra dalam pengelolaan ekowisata sehingga diperlukan monitoring. Tingkat kepuasan mitra terhadap pengelolaan ekowisata yang dilakukan oleh TNGGP dalam perencanaan dan pengelolaan dinilai agak puas. Penilaian agak puas diberikan oleh mitra dikarenakan dalam perencanaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh TNGGP sudah sesuai dengan yang direncanakan. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan. Hasil dari kerjasama ini menghasilkan benefit yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (Handoko H 2001). Skor tingkat kepuasan pengelola dan mitra tertera pada Tabel 11.

**Tabel 11 Tingkat kepuasan terhadap pengelola atau mitra**

Elemen persepsi	Skor Persepsi			
	Pengelola terhadap Mitra	Keterangan	Mitra terhadap Pengelola	Keterangan
Perencanaan anggaran ekowisata	4.9	Agak puas	4.6	Agak puas
Pengelolaan anggaran ekowisata	4.9	Agak puas	4.8	Agak puas
Monitoring pengelolaan ekowisata	5.0	Agak puas	4.9	Agak puas
Evaluasi pengelolaan ekowisata	4.0	Cukup	4.9	Agak puas
Kerjasama yang dilakukan dari kedua belah pihak	5.7	Puas	5.3	Agak puas
Benefit yang dapat diambil dari kerjasama	6.1	Puas	5.1	Agak puas

### Menilai Upaya Evaluasi Harmonisasi Anggaran Ekowisata

Sholahuddin (2001) mengungkapkan lembaga mempunyai pengaruh kuat untuk mencapai efektivitas perannya dalam melakukan pengelolaan dan perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu 1) aspek struktur organisasi yang fleksibel dalam menghadapi kondisi tertentu dan mampu untuk menyesuaikan terhadap lingkungan yang dihadapi, 2) aspek kejelasan fungsi dari setiap lembaga berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, 3) aspek tata nilai atau norma, dalam setiap organisasi harus mempunyai tata nilai yang dipatuhi oleh elemen-elemen dalam organisasi. Upaya harmonisasi berhasil dilakukan TNGGP dalam perencanaan dan penggunaan anggaran adalah dengan melalukan perubahan implementasi rencana kerja dari dokumen RPJP ke RKT dan melalukan kerja sama dengan pihak luar. Ada beberapa implementasi perencanaan program kegiatan yang berada di RPJP dituangkan menjadi RKT ini melalui proses penyesuaian dengan program prioritas dan dengan kebijakan baru. Penyesuaian juga diikuti dengan perubahan perencanaan anggaran. Penyesuaian anggaran yang tersedia akan direalisasikan melalui program kegiatan prioritas yang ada di RKT. Dirjen PRL (2015) mengungkapkan keikutsertaan mitra dalam pengelolaan kawasan untuk mendukung peningkatan efektifitas dari pengelolaan kawasan itu sendiri. Mitra adalah pihak lain yang dengan dana dan/atau keahlian teknis yang dimilikinya melakukan kerja sama dengan pengelola Konservasi Sumberdaya Alam (KSA) dan Konservasi Pelestarian Alam (KPA).

Mitra yang bekerjasama dalam bidang ekowisata ada tiga yaitu Conservation International Indonesia, MNC Land, dan PT. Fontis Aquam Vivam. Mitra kerjasama ini memiliki berbagai macam bentuk perjanjian yang digunakan. CI Indonesia merupakan instansi internasional dibidang konservasi. CI Indonesia dan MNC Land melakukan pengelolaan ekowisata di Resort Bodogol, sedangkan PT Fontis Aquam Vivam berada di Resort Situgunung. Rencana kerja MNC land pada tahun 2018 adalah pembuatan Nursery Hoya, perbaikan jalan menuju lokasi wisata PPKAB, pembuatan tangga serta pegangan di jalur menuju air terjun Cikaweni, dan monitoring evaluasi kegiatan. Rencana kerja CI Indonesia tahun 2018 yaitu penguatan dan pendidikan sumberdaya manusia yang disalurkan forum Interpreter, perbaikan akses jalan PPKAB, *Sign Born* atau penggantian tanda, dan renovasi fasilitas-fasilitas yang ada di PPKAB. Rencana kerja yang diusulkan oleh CI Indonesia masih dalam perpanjangan kerjasama, karena kontrak kerjasama CI

dengan TNGGP selesai pada tahun 2017. Perpanjangan kontrak Kerjasama yang dilakukan CI melalui Dirjen KSDAE. Rencana kerja tahunan yang dikerjakan oleh PT Fontis Aquam Vivam melalui program penyusunan rencana pelaksanaan program dan rencana kerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan, pencegahan gangguan, patroli, penguatan tenaga pam, pembangunan sarana prasarana wisata alam, promosi dan kelembagaan. Dalam masa penggeraan rencana kerja tahunan PT. Fontis Aquam Vivam masih banyak yang belum dikerjakan, seperti pada program pencegahan gangguan, patroli, penguatan tenaga pam, pembangunan sarana prasarana wisata alam dalam jenis kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pos pam wisata, pembangunan dan pemeliharaan jembatan gantung, dan pembuatan bak sampah, serta pada program kelembagaan dalam jenis kegiatan pembentukan kelompok. Hasil perjanjian kerja sama dilakukan selama lima tahun, ketika ada pekerjaan tidak terselesaikan maka akan dialihkan ke tahun selanjutnya dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Mekanisme perencanaan dan penggunaan anggaran dilakukan dengan baik oleh TNGGP. Perencanaan pengajuan anggaran tidak semua terealisasikan karena terdapat pemilihan program kegiatan prioritas yang akan dikelola. Penggunaan anggaran sudah dilakukan dengan baik oleh TNGGP dengan adanya pembagian dari anggaran pada tahap perencanaan, pengembangan sumberdaya manusia, promosi, pembangunan sarana prasarana, dan pemeliharaan ekowisata. Tingkat kepuasan pengelola TNGGP terhadap pengelolaan ekowisata tergolong agak baik karena dalam perencanaan anggaran yang diajukan tidak semua didapat, terdapat program kegiatan yang menjadi prioritas dalam pengelolaan, tetapi dalam implementasi penggunaan anggaran telah terealisasikan semua. Tingkat kepuasan pengelola TNGGP dan mitra cukup memuaskan karena hasil dari kerjasama dalam pengelolaan ekowisata dapat memberikan benefit dari kedua belah pihak. Tingkat kepuasan upaya evaluasi harmonisasi anggaran ekowisata berhasil dilakukan karena dalam pengelolaan perencanaan anggaran TNGGP melakukan pemilihan program kegiatan prioritas dan bekerjasama dengan pihak luar.

### Saran

Perencanaan program kegiatan seharusnya direncanakan secara matang dalam jangka panjang sehingga dalam implementasi program dapat tercapai sesuai dengan rencana awal dan perencanaan anggaran secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Altinay L, Paraskevas A. 2008. *Planning Research in Hospitality and Tourism*. Oxford (GB): Butterworth-Heinemann.
- Asmokol, Hindri. 2006. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol(2): 2.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta (ID): Rineka Cipta.
- [BBTNGGP] Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. 2015. *Selayang Pandang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango*. Cibodas (ID). Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- [BBTNGGP] Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. 2019. *Laporan Kinerja (LKj) Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2018*. Cibodas (ID). Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- [Dirjen PHKA] Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2006. Analisa Standar Minimal Pengelolaan Kawasan Konservasi. Laporan. Jakarta (ID): Departemen Kehutanan.
- [Dirjen PHKA] Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.3/IV-SET/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- [Dirjen PHKA] Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2008. Pedoman Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Penyangga. Jakarta (ID): Departemen Kehutanan.
- [Dirjen PRL] Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. 2015. Mekanisme dan Alternatif Sunver Pendanaan Kawasan Konservasi Air. Laporan. Jakarta (ID): Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
- Handoko H. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta (ID): BPFE Jogja
- Haeruman. 2001. *Kemitraan dalam pengembangan ekonomi lokal*. Jakarta(ID): Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota.
- Hendriyani. 2013. Analisis Isi: Sebuah Pengantar Metodologi yang Mendalam dan Kaya dengan Contoh. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 2(1): 63-65.
- Idrus, M. 2009. *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta (ID): PT. Gelora Akasara Pratama.
- Junaidi. 2008. Aplikasi konsep ekowisata dalam perencanaan zona pemanfaatan taman nasional untuk pariwisata dengan pendekatan ruang. [Tesis]. Bgor (ID): Institut Pertanian Bogor
- [PMK] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
- [PKLK] Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- [PP] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

- [PP] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- [Persekjen KLHK] Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.4/Setjen/Rokeu/Keu.1/8/2017 Tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Sholahuddin A. 2001. Analisis Kelebagian Pengembangan Agroindustri (Studi Kasus Kabupaten Tebo, Jambi). [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Suhadak, Nugroho T. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang (ID): Bayumedia Publishing.
- Sutopo HB. 2006. *Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta (ID): Universitas Sebelas Maret.
- Tjiptono F. 2004. *Strategi Pemasaran,edisi kedua*. Yogyakarta (ID): Andi Offset.
- Triutami HW. 2009. Keterlibatan Warga Pulau Pamuka dalam Usaha Ekowisata di Kepulauan Series.
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Yunus A. 2014. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan (Fungsi-Fungsi Manajemen)*. Majalengka (ID): Universitas Majalengka.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 Pendopo di Resort Selabintana

Gambar 2 Toilet di Resort Selabintana



Gambar 3 Wawancara di Resort Selabintana

Gambar 4 Masjid di Resort Selabintana

## RIWAYAT HIDUP

Desty Sunja Purnama lahir di Bukit Suban, 25 Desember 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Sunardi dan Yeni. Penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 MERANGIN dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa IPB University melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Depatemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan.

Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti organisasi Lembaga Dakwah Fakultas-E Ibadurrahmaan, HIMAKOVA, dan pengurus Kajian Rutin Al-Hurriyyah tahun 2019. Penulis juga pernah menjadi asisten PAI tahun 2017 dan mengajar di Yayasan Ar-Ruhama tahun 2019. Penulis pernah mengikuti kegiatan Pratek Umum Kehutanan (PUK) di Leuweung Sancang Barat-CA, Kamojang, dan Hutan Pendidikan Gunung Walat tahun 2017 dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Margomulyo Kecamatan Bojonegoro Jawa Timur tahun 2018.

Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan IPB University, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Anggaran Program Ekowisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango”, dibawah bimbingan Dr. Ir. Tutut Sunarminto, Msi dan Dr. Ir. Harnios Arief, MScF.